



Article Informations
Corresponding Email:
jihanekestiana17@gmail.com

Received: 27/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

KEPENTINGAN JEPANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN KEMANUSIAAN KE INDONESIA DI ERA PANDEMI 2020-2021

Jihan Eka Listiana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Di tengah krisis kesehatan global, Jepang tampil sebagai salah satu donor utama melalui program *Official Development Assistance* (ODA). Meskipun bantuan tersebut mencakup alat medis, dukungan finansial, dan kerja sama teknis, penelitian ini berargumen bahwa pemberian bantuan tersebut tidak sepenuhnya bersifat altruistik, melainkan menjadi instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Jepang yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya, seperti stabilitas kawasan, keterlibatan ekonomi, dan proyeksi *soft power*. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teori neorealisme serta analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini menganalisis bagaimana Jepang memanfaatkan bantuan kemanusiaan sebagai alat diplomasi untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. Temuan menunjukkan bahwa tindakan Jepang mencerminkan respons rasional terhadap sistem internasional yang anarkis, di mana kerja sama digunakan untuk meningkatkan keuntungan relatif dan posisi geopolitik. Selain itu, bantuan ini juga memperkuat citra Jepang sebagai aktor global yang bertanggung jawab, sekaligus mempererat ketergantungan ekonomi dengan Indonesia.

Kata Kunci: Jepang, Indonesia, COVID-19, bantuan kemanusiaan, kepentingan nasional, ODA, diplomasi.

Abstract

Amid a global health crisis, Japan emerged as one of the key donors through its Official Development Assistance (ODA) program. While the assistance included medical equipment, financial support, and technical cooperation, this study argues that the aid was not purely humanitarian in nature. Instead, it served as a strategic instrument in Japan's foreign policy, aligning with its broader national interests such as regional stability, economic engagement, and soft power projection.

Using a qualitative method and the theoretical lens of neorealism and foreign policy analysis, the research examines how Japan leveraged humanitarian aid as a diplomatic tool to maintain influence in Southeast Asia, particularly with Indonesia as a strategic partner. The findings show that Japan's actions reflect a rational response

to the international system's anarchy, where cooperation is pursued to enhance relative gains and geopolitical positioning. Furthermore, the study reveals that the aid also reinforced Japan's international image as a responsible global actor, while simultaneously fostering economic interdependence with Indonesia.

Keywords: *Japan, Indonesia, COVID-19, humanitarian aid, national interest, ODA, diplomacy*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 2019 menjadi krisis kesehatan global terbesar abad ke-21. Virus menyebar dengan cepat ke seluruh dunia sehingga pada 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga meluas ke sosial, politik, dan ekonomi global. Rantai pasok internasional terganggu, pariwisata runtuh, dan hampir semua negara mengalami resesi pada 2020 (World Bank, 2021). OECD mencatat bahwa nilai bantuan luar negeri justru meningkat hingga USD 161,2 miliar, menunjukkan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi krisis (OECD 2020).

Sebagai negara maju dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang memiliki kapasitas teknologi, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat maju. Industri otomotif, elektronik, hingga robotika menjadikan Jepang sebagai pusat global inovasi. Sistem kesehatan universal Jepang dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas rumah sakit per kapita relatif tinggi mampu meredam dampak pandemi secara lebih baik dibanding banyak negara lain. Namun, meski memiliki kapasitas tersebut, Jepang tetap mencatat lebih dari 33 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 74 ribu kematian hingga April 2024 (WorldOMeter, 2024).

Namun, di tengah situasi domestik yang berat, Jepang tetap konsisten menyalurkan bantuan ke negara lain, termasuk Indonesia. Bantuan tersebut berupa hibah, pinjaman darurat, pasokan vaksin, serta dukungan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun mekanisme multilateral seperti COVAX (JICA, 2021). Hal ini menunjukkan adanya

dimensi kepentingan strategis yang lebih luas, bukan sekadar tindakan kemanusiaan.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan jauh lebih berat. Lonjakan kasus sejak Maret 2020 membuat sistem kesehatan kewalahan. Rumah sakit penuh sesak, tenaga medis terbatas, dan ketersediaan oksigen maupun alat pelindung diri sering tidak mencukupi. Hingga April 2024 tercatat lebih dari 6,8 juta kasus dengan 162 ribu kematian (WorldOMeter, 2024).

Di sektor ekonomi, terjadi penurunan PDB sebesar 2,1%, tetapi proyeksi dari Survei menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,9% pada tahun 2021 dan 5,4% pada tahun 2022, didorong oleh permintaan yang terpendam terhadap produk modal dan konsumen, dengan pemulihan diperkirakan akan mendapatkan momentum seiring pembatasan pembatasan sosial secara bertahap dicabut dan kampanye vaksinasi berjalan di seluruh kepulauan dengan 17.000 pulau tersebut (Hamzah, 2021). Dampak sosial paling terasa pada kelompok rentan, terutama pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Data UNDP menempatkan Indonesia pada peringkat ke-130 dari 199 negara dalam Human Development Index, memperlihatkan keterbatasan pembangunan manusia dibandingkan Jepang (Antara, 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya bantuan luar negeri untuk menopang ketahanan nasional.

Dalam konteks inilah, ODA Jepang berfungsi sebagai instrumen strategis. Bantuan mencakup pengadaan peralatan medis, distribusi vaksin, pelatihan tenaga kesehatan, serta dukungan finansial untuk program pemulihan ekonomi (MOFA, 2022). Jepang menekankan prinsip human security dan pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari motif politik dan ekonomi. Dengan menjaga stabilitas Indonesia sebagai mitra strategis, Jepang turut melindungi akses pasar, investasi, dan posisinya di Asia Tenggara.

ODA juga mencerminkan strategi soft power Jepang. Melalui diplomasi kesehatan, Jepang memperkuat citra sebagai mitra yang dapat diandalkan,

sekaligus menyeimbangkan pengaruh negara besar lain seperti Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan (Nye, 2004). Namun, bantuan ini juga menimbulkan dilema bagi Indonesia: di satu sisi sangat membantu, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang terhadap donor eksternal.

Literatur hubungan internasional membedakan dua model bantuan luar negeri: model kebutuhan, yang berorientasi pada penerima, dan model kepentingan, yang menekankan keuntungan donor (Packenham, 1966). Bantuan Jepang kepada Indonesia pada masa pandemi tampaknya memadukan keduanya. Di satu sisi, ada dimensi kemanusiaan nyata untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia. Di sisi lain, terdapat kepentingan strategis Jepang dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan.

ODA Jepang selama pandemi COVID-19 tidak bisa dipahami hanya sebagai solidaritas. Ia merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang merefleksikan kombinasi nilai kemanusiaan dan kalkulasi kepentingan nasional. Analisis lebih lanjut terhadap pola bantuan ini penting untuk memahami bagaimana Jepang memosisikan diri di Asia dan bagaimana Indonesia merespons dinamika tersebut.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 membuka ruang baru bagi Jepang untuk menegaskan diplomasi kesehatan melalui ODA. Bantuan yang diberikan kepada Indonesia tidak hanya membantu mengatasi krisis, tetapi juga memperkuat ikatan bilateral yang sudah terjalin lama. Namun, implikasi jangka panjangnya menuntut kewaspadaan, baik dari sisi potensi ketergantungan Indonesia maupun kemungkinan syarat strategis yang melekat pada bantuan Jepang. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana ODA benar-benar berfungsi sebagai instrumen kepentingan nasional Jepang sekaligus sebagai sarana pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Jepang

Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional (Bainus dan Rachman, 2018). Kenneth Waltz sendiri menyebut kepentingan nasional bagaikan “sinyal otomatis” yang mengarahkan pemimpin negara untuk menentukan kapan dan ke mana mereka bergerak (Waltz, 1979). Sementara itu, Robert A. Packenham menambahkan bahwa istilah ini sering kali bersifat politis, dipakai untuk membenarkan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan bantuan luar negeri (Packenham, 1966). Dengan demikian, kepentingan nasional tidak sekadar slogan, melainkan kerangka dasar bagi Jepang maupun Indonesia dalam menentukan arah hubungan bilateral, termasuk ketika menghadapi pandemi COVID-19.

Hubungan diplomatik resmi Indonesia–Jepang dimulai tahun 1958, diawali dengan kesepakatan pampasan perang yang menandai rekonsiliasi kedua negara (Togo, 2010). Sejak itu, Jepang memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pertahanan. Namun hubungan ini juga diwarnai pasang surut. Pada 1975 misalnya, peristiwa Malari menyoroti resistensi publik terhadap investasi Jepang yang dianggap hanya menguntungkan kepentingan asing (Rachmawati, 2019).

Sejak 1980-an, hubungan bilateral semakin intens dengan kerja sama hampir di semua sektor. Tantangan muncul kembali setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika Tiongkok mulai mendominasi Asia Tenggara lewat CAFTA (2001) dan strategi perluasan pengaruh ekonominya. Jepang merespons dengan “Koizumi Doctrine” (2002) yang menegaskan Asia Tenggara sebagai mitra utama, serta memperkuat perannya melalui forum ASEAN+3 (Hadi, 2009). Meski pada tahun 2019 Tiongkok menyalip Jepang

sebagai mitra dagang utama Indonesia, Jepang tetap menjadi salah satu partner strategis, khususnya di bidang pembangunan dan investasi.

Sejak bergabung dalam Colombo Plan (1954), Jepang menggunakan Official Development Assistance (ODA) sebagai instrumen utama diplomasi. Di Indonesia, ODA hadir dalam bentuk pinjaman, hibah, dan kerja sama teknis, mencakup proyek transportasi (MRT Jakarta), kesehatan ibu dan anak, penelitian lingkungan, hingga pelatihan tenaga kerja (JICA, 2018). Jepang bahkan menjadi donor tunggal terbesar dengan kontribusi 45% dari seluruh ODA yang masuk ke Indonesia sejak 1960 (Rachmawati, 2019).

ODA juga digunakan untuk respons bencana, seperti bantuan rekonstruksi pascatsunami 2004, bantuan pascabencana Palu 2018, hingga bantuan kesehatan dan pinjaman darurat saat pandemi COVID-19. Instrumen lain adalah Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), perjanjian perdagangan bebas pertama Indonesia yang mulai berlaku pada 2007. IJEPA memperluas akses pasar, meningkatkan investasi Jepang di sektor manufaktur, serta memperkuat perdagangan komoditas energi dan pertanian. Melalui ODA dan IJEPA, Jepang berusaha mempertahankan kedudukannya sebagai mitra utama Indonesia sekaligus menandingi pengaruh Tiongkok di kawasan.

Pandemi COVID-19 mempertegas peran diplomasi kesehatan Jepang. Sejak 2020, Jepang menyalurkan hibah darurat, peralatan medis, dan donasi vaksin ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Bantuan berupa ventilator, PCR kit, ambulans, hingga ribuan oksigen konsentrator didistribusikan melalui kerja sama dengan UNOPS dan WHO. Selain itu, Jepang mendukung COVAX Facility dengan kontribusi 1,5 miliar dolar AS, serta program “Last One Mile” untuk memastikan akses vaksin di negara berkembang (MOFA, 2022).

Untuk Indonesia, Jepang memberikan dukungan finansial dan logistik senilai jutaan dolar, ditambah kerja sama pertahanan melalui forum 2+2 (Menlu–Menhan) yang membahas transfer peralatan maritim dan isu Laut

Cina Selatan. Jepang juga menyerahkan kapal patroli “Shirahagi-maru” pada 2021 sebagai bagian dari bantuan keamanan non-militer.

Di level global, Jepang aktif di G7 dan G20, menekankan Universal Health Coverage (UHC) dan Global Health Architecture (GHA) sebagai pilar pemulihan pasca pandemi. Pandemi menjadi bukti bahwa bagi Jepang, diplomasi kesehatan bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan, stabilitas kawasan, dan citra internasional.

Hal ini menegaskan bahwa kepentingan nasional Jepang mewarnai seluruh pola hubungan dengan Indonesia. ODA dan IJEPA menjadi instrumen diplomasi utama, sementara pandemi COVID-19 memperlihatkan adaptasi Jepang dalam menggabungkan dimensi kemanusiaan dan politik luar negeri. Hubungan bilateral yang dinamis, meski dipengaruhi persaingan Tiongkok, tetap memiliki fondasi kokoh karena kepentingan strategis yang saling menguntungkan.

Bantuan Internasional Jepang ke Indonesia di Masa Pandemi COVID-19

Kasus pertama COVID-19 di Jepang tercatat pada Januari 2020, disusul kluster besar di kapal pesiar Diamond Princess yang menewaskan 14 orang dari 3.700 penumpang. Jepang mendapat kritik karena dianggap lamban merespons, tetapi berhasil menekan laju penularan berkat budaya sosial seperti penggunaan masker, salam tanpa kontak fisik, serta kedisiplinan kolektif. Pemerintah tidak menerapkan *lockdown* paksa, melainkan *state of emergency* yang lebih menekankan pada norma sosial. Hasilnya, mobilitas di Tokyo turun drastis hingga 50% hanya seminggu setelah status darurat diumumkan (Yabe dkk, 2020)

Dari sisi ekonomi, pandemi memicu kontraksi 7,8% pada kuartal II 2020, terburuk dalam sejarah modern Jepang (Kontan.id, 2020). Pemerintah meluncurkan stimulus 117 triliun yen, termasuk transfer tunai universal 100.000 yen per orang. Namun, belanja rumah tangga tetap terbatas karena

ketidakpastian jangka panjang. Dampak pandemi juga memaksa penundaan Olimpiade Tokyo 2020 ke 2021. Meski demikian, penyelenggaraan Olimpiade dengan protokol kesehatan ketat berhasil mencegah kluster besar, dengan hanya 547 kasus dari 70.000 peserta dan staf (Chowdhury dkk, 2023). Selain kebijakan domestik, Jepang tetap aktif menjalin kerja sama internasional. Bantuan ke Indonesia, termasuk hibah, pinjaman, dan pasokan medis, menjadi bagian dari strategi memperkuat hubungan bilateral dan stabilitas regional.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani pandemi akibat keterbatasan fiskal, birokrasi, dan infrastruktur kesehatan. Jepang melalui ODA menyalurkan pinjaman lunak 50 miliar yen pada 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi dan layanan kesehatan, bekerja sama dengan Asian Development Bank (JICA, 2020). Program ini ditujukan untuk menjaga kegiatan ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memperkuat kapasitas medis.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Yoshihide Suga tahun 2020 menegaskan empat fokus: kerja sama kesehatan, Travel Corridor Arrangement untuk bisnis penting, kerja sama ekonomi, dan kemitraan multilateral (Sekretariat Kabinet RI, 2020). Selanjutnya, Jepang menyalurkan berbagai bantuan berupa renovasi klinik dan pengadaan alat kesehatan di Garut pada tahun 2021, hibah 2.800 oxygen concentrator melalui UNOPS senilai USD 5,6 juta pada tahun 2021, serta donasi vaksin AstraZeneca lebih dari 4 juta dosis ke Indonesia pada 2021. Selain itu, Jepang mendukung peningkatan kapasitas tenaga medis Indonesia melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan kerja sama teknis di bidang kesehatan masyarakat. Bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Motif utama Jepang dalam memberikan bantuan tidak hanya kemanusiaan, tetapi juga geopolitik. Peningkatan agresivitas Tiongkok di Asia Tenggara, termasuk diplomasi vaksin, mendorong Jepang memperkuat posisinya agar tidak kehilangan pengaruh (Setiawan, 2023). Dengan

menawarkan bantuan yang dianggap lebih transparan dibandingkan Tiongkok, Jepang menegaskan citranya sebagai mitra yang “aman” bagi Indonesia.

Bantuan pandemi juga menjadi instrumen untuk memperkuat goodwill dan ketergantungan positif Indonesia terhadap Jepang. Sejalan dengan pandangan Packenham, bantuan luar negeri adalah instrumen kebijakan luar negeri yang diarahkan demi kepentingan nasional (Packenham, 1966). Jepang melalui ODA memadukan nilai kemanusiaan dengan kalkulasi politik: memperluas jejaring investasi, menjaga stabilitas kawasan, dan mempertahankan hubungan bilateral yang strategis. Bantuan pandemi juga meningkatkan reputasi Jepang dalam diplomasi kesehatan global. Di forum multilateral seperti G20 Bali 2022 dan G7 Hiroshima 2023, Jepang menekankan Universal Health Coverage (UHC) dan Global Health Architecture (GHA), memperlihatkan perannya sebagai aktor global yang peduli pada isu kesehatan dunia.

Pandemi COVID-19 memperlihatkan wajah ganda diplomasi Jepang. Di satu sisi, bantuan ke Indonesia jelas membantu respons kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain, langkah tersebut mencerminkan strategi untuk membendung pengaruh Tiongkok, memperkuat hubungan bilateral, dan menjaga kepentingan nasional Jepang di kawasan. Dengan demikian, diplomasi kesehatan Jepang selama pandemi adalah contoh nyata bagaimana solidaritas kemanusiaan dan kepentingan strategis saling berhubungan erat.

Kepentingan Nasional Jepang Dalam Memberikan Bantuan Kemanusiaan ke Indonesia di Era Pandemi 2020-2021

Pandemi COVID-19 mengguncang rantai pasok global. Jepang yang sangat bergantung pada manufaktur di Asia Tenggara, segera menyalurkan bantuan ke Indonesia. Pada 2020, JICA menandatangani pinjaman lunak 50 miliar yen bekerja sama dengan ADB untuk COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program Loan. Meski disebut bantuan, skema ini sejatinya utang yang tetap harus dilunasi. Dana ini diarahkan mendukung

SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di saat bersamaan, banyak pabrik Jepang di Indonesia tutup, memicu PHK massal. Relokasi investasi besar-besaran pun dilakukan: Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, hingga Toyota memperluas operasinya di Indonesia. Dengan cara ini, Jepang mengamankan rantai pasok sekaligus menekan ketergantungan Indonesia pada Tiongkok. Perspektif neorealisme menjelaskan bahwa bantuan semacam ini adalah strategi *self-help*: Jepang bertindak untuk memastikan stabilitas mitra dagang vitalnya (Waltz, 1979). Nilai perdagangan bilateral mencapai USD 24,3 miliar pada 2020, menunjukkan posisi strategis Indonesia bagi ekonomi Jepang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021).

Sementara itu, aspek keamanan di era pandemi tidak lagi terbatas pada aspek militer. Jepang melihat COVID-19 sebagai ancaman non-tradisional yang dapat melemahkan stabilitas regional. Bantuan kesehatan ke Indonesia yang berupa vaksin, oksigen, hingga pinjaman ODA dipandang sebagai instrumen *soft power* yang melindungi Jepang dari risiko lintas batas. Pada 2021, Jepang menyalurkan lebih dari 4 juta dosis vaksin AstraZeneca dan hibah senilai 6,9 miliar yen (MOFA, 2021). Bantuan ini bukan hanya solidaritas, melainkan strategi mencegah wabah tak terkendali di Indonesia yang bisa berdampak langsung ke Jepang.

Di ranah maritim, Jepang memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Melalui forum 2+2 pada 2021, Jepang mendorong transfer teknologi pertahanan dan memperkuat pengawasan laut. Hibah kapal patroli “Shirahagi-maru” menandai peran Jepang dalam keamanan non-militer kawasan (Yamaguchi, 2021). Dengan pendekatan *soft balancing*, Jepang menahan penetrasi kekuatan lain (khususnya Tiongkok) tanpa harus meningkatkan kehadiran militer secara langsung.

Indonesia sendiri menjadi arena strategis dalam rivalitas Jepang–Tiongkok. Sejak awal pandemi, Tiongkok membanjiri Indonesia dengan vaksin dan bantuan kesehatan. Jepang menanggapi dengan menyalurkan

pinjaman, vaksin, dan dukungan pembangunan untuk memastikan Indonesia tetap berada dalam orbit strategisnya. Dari sudut pandang neorealisme, langkah ini adalah upaya balance of power. Jepang berusaha menjaga agar Indonesia netral di tengah konflik Laut Cina Selatan dan tetap menjadi mitra kunci dalam strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) (Yeremia dan Raditio, 2021). Stabilitas internal Indonesia, yang berada di jalur vital perdagangan energi Jepang, dipandang sebagai faktor penting bagi keamanan ekonomi dan maritim Jepang.

Bantuan kemanusiaan juga sarat dimensi ideologis. Jepang mengusung prinsip Proactive Contribution to Peace sejak 2013, yang menekankan peran aktif dalam stabilitas global. Bantuan vaksin ke Indonesia melalui COVAX (total ±4 juta dosis pada 2021) memperkuat citra Jepang sebagai mitra yang kredibel. Selain barang, Jepang juga menyalurkan pelatihan daring untuk tenaga medis Indonesia melalui JICA, menegaskan nilai solidaritas dan transfer pengetahuan. Menurut Packenham, bantuan luar negeri selalu mengandung dimensi ideologis: memperkuat legitimasi moral sekaligus kepentingan nasional (Packenham, 1973).

Sejarah panjang penyesalan Jepang atas agresi Perang Dunia II tercermin dalam diplomasi moralnya. Bantuan pandemi, termasuk evakuasi ABK Diamond Princess, hibah oksigen, dan kerja sama teknis, mempertegas citra Jepang sebagai peace state yang bertanggung jawab. Namun, retorika “kemitraan setara” masih menyisakan ketimpangan teknis, misalnya keterbatasan transfer teknologi yang berpotensi memunculkan ketergantungan Indonesia. Dengan demikian, bantuan pandemi memperlihatkan kompleksitas: solidaritas moral, kalkulasi strategis, dan pencitraan ideologis berpadu untuk memperkuat posisi Jepang di Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang kepada Indonesia selama pandemi COVID-19 tidak semata didorong oleh solidaritas kemanusiaan, melainkan juga strategi untuk mengamankan kepentingan

nasional. Bentuk bantuan berupa pinjaman, vaksin, peralatan medis, hingga kerja sama maritim mencerminkan upaya Jepang memperkuat hubungan ekonomi dan menjaga stabilitas kawasan. Dari perspektif neorealisme, langkah ini adalah strategi self-help untuk menjamin keberlangsungan rantai pasok dan posisi strategis Jepang di tengah sistem internasional yang anarkis. Selain ekonomi, bantuan juga berfungsi sebagai instrumen keamanan non-tradisional. Dukungan maritim dan pelatihan bagi Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk melindungi jalur perdagangan vital sekaligus menjadi bentuk soft balancing terhadap pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Dari sisi nilai, bantuan ini sejalan dengan prinsip Proactive Contribution to Peace yang menegaskan citra Jepang sebagai peace state. Namun, di balik retorika tersebut terselip tujuan mempertahankan pengaruh regional dan menandingi diplomasi vaksin Tiongkok. Dengan demikian, bantuan Jepang di masa pandemi berperan ganda: menanggulangi krisis kesehatan sekaligus mengamankan kepentingan strategisnya dalam percaturan Indo-Pasifik.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]

- Achmad Cholis Hamzah. "Indonesian Economic Optimism In 2022 But Remain Vigilant". Unair. (2021). <https://unair.ac.id/indonesian-economic-optimism-in-2022-but-remain-vigilant/#:~:text=GDP%20shrank%20by%202.1%25%20in,the%20archipelago%20of%2017%2C000%20islands>
- Antara. "Indonesia ranks 130th on Human Development Index: BKKBN". 7 Desember 2022. Online. <https://en.antaraneews.com/news/264243/indonesia-ranks-130th-on-human-development-index-bkkbn>
- Ardhitya Eduard Yeremia and Klaus Heinrich Raditio, "Indonesia-China Vaccine Cooperation and South China Sea Diplomacy," Perspective, no. 55 (2021): 1-15, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/03/ISEAS_Perspective_2021_55.pdf.

- Arry Bainus & Junita Budi Rachman, “Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional”, *Intermestic: Journal of International Studies* Vol. 2 No. 2, Mei 2018 hal. 109
- Chowdhury, T., Chowdhury, H., Bontempi, E. et al. Are mega-events super spreaders of infectious diseases similar to COVID-19? A look into Tokyo 2020 Olympics and Paralympics to improve preparedness of next international events. *Environ Sci Pollut Res* 30, 10099–10109 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22660-2>
- Filzah Nazurah Setiawan dan Sagita Natasya Siagian, “Indonesia-Japan Cooperation During Covid-19”, *Sathhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2023)
- Iva Rachmawati. “Politik Luar Negeri Jepang”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) 219
- Japan International Cooperation Agency, “Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Lunak ODA Jepang Dengan Republik Indonesia : Kontribusi Dukungan Terhadap Pandemi COVID-19,” 2020, <https://www.jica.go.jp/indonesian/overseas/indonesia/information/press/2020/200803.html>.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). “Training Program for Medical Personnel in Indonesia.” 2021, online, www.jica.go.jp/english/news/field/2021/corona_indonesia.html
- JICA. “Tinjauan Pembangun Indonesia dan Kerjasama Jepang: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan,” *Jica*, April (2018): 33-34. https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/ku57pq00002izqzn-att/indonesia_development_ind.pdf
- Kazuhiko Togo. *Japan’s Foreign Policy 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy* (Leiden: Brill, 2010) 195
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. “Peningkatan Kerja Sama Indonesia–Jepang sebagai Mitra Strategis Terus Berlanjut,” 10 Agustus 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3206/peningkatan-kerja-sama-indonesia-jepang-sebagai-mitra-strategis-terus-berlanjut>

Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), <https://doi.org/10.1590/s0034-73292004000100012>.

Mari Yamaguchi, "Japan, Indonesia sign arms transfer pact amid China concerns", *Defense News*, 31 Maret 2021, online, diakses Juli 2025, <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/03/30/japan-indonesia-sign-arms-transfer-pact-amid-china-concerns>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Japan's Response to COVID-19 for Developing countries". June 2022. Internet. https://www.mofa.go.jp/ic/ap_m/page23e_000595.html

MOFA, "Fact Sheet: Major Examples of Japan's COVID-19 related Support towards ASEAN", 27 Oktober 2021, online, diakses Agustus 2025, <https://www.mofa.go.jp/files/100252718.pdf>

Mofa Japan. "Support for COVID-19 Response". internet, <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2022/html/honbun/b2/feature1.html>

Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs, 2004, hal. 5–6.

OECD. "COVID-19 spending helped to lift foreign aid to an all-time high in 2020 but more effort needed". 2021. *online*, <https://www.oecd.org/newsroom/covid-19-spending-helped-to-lift-foreign-aid-to-an-all-time-high-in-2020-but-more-effort-needed.htm>

Packenham, Robert A. "Foreign Aid and the National Interest", *Midwest Journal of Political Science*, 1966, Vol. 10, No. 2, 1966, 214-221

Packenham, Robert A. *Liberal America and the Third World: Political Development Ideas in Foreign Aid*. Princeton University Press, 1973. 45–46.

Setkab RI. "Termasuk Pengelolaan Pandemi COVID-19, Inilah Empat Poin Kerja Sama Indonesia-Jepang". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. 17–19, online, <https://setkab.go.id/termasuk-pengelolaan-pandemi-covid-19-inilah-emhttps://setkab.go.id/termasuk->

pengelolaan-pandemi-covid-19-inilah-empat-poin-kerja-sama-indonesia-jepang/.

Syamsul Hadi. "Checkbook Diplomacy Jepang dalam Hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia". Jurnal Hukum Internasional, Vol 6 No. 2, 2009

Takahiro Yabe, dkk. "Non-Compulsory Measures Sufficiently Reduced Human Mobility in Tokyo during the COVID-19 Epidemic". arXiv (Cornell University) Juni 2020. (1-3). doi.org/10.48550/arXiv.2005.09423

WorldOMeter, "Coronavirus - Indonesia", 2024, *online*, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

WorldOMeter, "Coronavirus - Japan", 2024, *online*, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/>

WorldOMeter, "Countries where COVID-19 has spread", 2024, *online*, <https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>

____. "Wabah Corona Membawa Ekonomi Jepang ke rekor Terburuk dalam Sejarah." Kontan.co.id (2020). *online*. <https://internasional.kontan.co.id/news/wabah-corona-membawa-ekonomi-jepang-ke-rekor-terburuk-dalam-sejarah>